



conference proceeding



# SIMPOSIUM NUSANTARA<sup>9</sup>

THE 9TH REGIONAL SYMPOSIUM OF THE MALAY ARCHIPELAGO  
*Revisit Islamic Civilization and Built Environment In The Malay World*

11 & 12 December 2012  
Al-Khawarizmi Lecture Hall  
UiTM(Perak)

Organized by:  
Centre for Knowledge & Understanding of Tropical Architecture & Interior (KUTAI)  
Centre for Islamic Thought & Understanding (CITU)  
Centre for Architecture, Planning & Surveying (FSPU)  
Faculty of Architecture, Planning & Surveying (Perak)  
Universiti Teknologi MARA (Perak)  
<http://perak.uitm.edu.my/simpورا9>



FSPU

PAPER CODE : HP414

## ISLAM IN PALEMBANG SULTANATE

Yunani<sup>a</sup>, Farida<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup>Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

---

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana para penguasa dan masyarakat Palembang dalam menjalankan agama Islam pada masa Kesultanan Palembang. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari adanya tulisan-tulisan miring yang banyak terdapat dalam arsip dan jurnal kolonial yang menyebutkan bahwa Islam di kesultanan ini tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan agama tersebut, dan penduduknya masih banyak menganut kepercayaan lama. Berbeda dengan etnis pendatang yang berasal dari Arab, yang teguh menjalankan agama Islam. Dari penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pandangan sepihak dari para kolonialis tidak terlepas dari kekurangpahaman mereka terhadap kondisi sesungguhnya dari penguasa dan penduduk setempat. Umumnya mereka hanya tinggal di ibu kota Palembang, sehingga tidak mengetahui denyut pelaksanaan ajaran Islam di pedalaman (*uluang*). Pandangan negatif tersebut tidak terlepas dari pandangan selintas (selayang pandang) atas kondisi penduduk Palembang pada waktu itu, tanpa terjun langsung dalam kehidupan masyarakat dalam jangka waktu cukup lama, serta kekurangpahaman bahasa-budaya setempat. Fakta yang ada menunjukkan bahwa pascaruntuhnya Kesultanan Aceh yang juga menjadi pusat pengembangan Islam, posisi tersebut disambut oleh Palembang dan Banjar pada pertengahan abad XVIII hingga pertengahan abad XIX. Palembang banyak melahirkan ulama-ulama yang tidak saja masyhur di Palembang, juga di Nusantara bahkan sampai Patani Thailand. Keberadaan mereka memiliki andil besar dalam membesarkan agama Islam di kawasan di atas. Untuk daerah *uluang* beberapa tokoh dapat disebutkan di sini, antara lain: Syekh Syihabuddin bin Abdullah Muhammad, Abd Shamad Al-Palimbani, Kemas Fakhruddin, Sultan Mahmud Badaruddin II, Pangeran Panembahan Bupati, Muhammad Muhyiddin bin Syekh Dyihabuddin, Kemas Muhammad bin Ahmad dan lainnya. Untuk kawasan *uluang* tercatat nama-nama antara lain: Tuan Tanjung Idrus Salam, Kemas Jambu, Syekh Habibul Hamim (daerah Komerang), Bujang Jawe, Penghulu Haji Pidin, Pangeran Abuleman (daerah Rawas). Pihak keraton Kesultanan Palembang juga aktif mengirimkan utusan-utusannya untuk mengislamkan dan membina keimanan penduduk *uluang*. Untuk itu perlu lebih jernih mendukung permasalahan pandangan miring bangsa kolonial, dengan memaparkan berbagai bukti yang mendukung atas keberadaan agama Islam di Kesultanan Palembang.

**Kata Kunci:** ulama, pandangan kolonial, bukti

---

### 1. Pendahuluan

Sebagaimana kawasan lain di Nusantara dan semenanjung yang sudah bersentuhan dan agama Islam sejak abad VII, begitu pula dengan Palembang yang berada di jalur pelayaran dan perdagangan dari dan ke bagian lain di Nusantara, baik bagian barat, tengah maupun timur. Keberadaan Islam di kawasan Asia Tenggara tidak terlepas dari adanya berita Arab. Disebutkan bahwa pada Abad VII sudah terdapat pemukiman Muslim di Kanton Cina, sedangkan untuk sampai ke sana sebagian menggunakan jalur laut (jalur keramik maritim) di selatan yaitu melalui Selat Melaka dan kawasan lainnya di Sumatera. Perubahan jalur tersebut disebabkan banyaknya gangguan keamanan di jalur Sutera. Hal ini mengakibatkan makin ramainya jalur keramik maritim, sehingga interaksi antara para pedagang Arab dan penduduk di kawasan Nusantara juga semakin berkembang (Ta Sen, 2010:110-113).

Agama Islam semakin berkembang di zaman kerajaan Palembang (abad XV). Bahkan sebelumnya disebutkan bahwa pada saat Palembang berada di bawah naungan Majapahit, penguasa Palembang pada waktu itu (Ario Damar) telah memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Ariodillah pada abad XIV. Itulah sebabnya, berbagai pihak menolak klaim Banten yang menyerang Palembang pada abad XVI sebagai “perang suci” untuk mengislamkan Palembang pada 1596.

Islam mencapai kemantapannya di wilayah ini dengan ditetapkannya agama Islam sebagai agama Negara pada masa pemerintahan sultan pertama yaitu Sultan Abdul Rakhman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam (1659-1702). Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, tentunya kehidupan penguasa dan masyarakatnya mencerminkan agama yang dianut. Akan tetapi, merujuk berbagai sumber kolonial memperlihatkan wajah Islam tidak sesuai dengan agama yang dianut oleh penduduk Palembang. Lebih lanjut dari sumber-sumber tersebut seolah melakukan pembenaran dengan membandingkan pemeluk Islam dari etnis Arab, yang menurut mereka jauh lebih taat dibanding ummat Islam di Kesultanan Palembang (Abdullah,1987:202; Woelders, 1975:74; Stibbe, 1932: 265; Faille, 1971:24).

Berdasarkan fakta di atas, timbul pertanyaan, “apakah benar sebagaimana para penulis barat gambarkan tentang kondisi keislaman di Kesultanan Palembang? Bagaimana para penguasa dan penduduk Palembang dalam menjalankan agama Islam yang mereka anut pada masa itu?”

## 2. Islam di Kesultanan Palembang

Apabila berbicara tentang Islam di Kesultanan Palembang, harus dimulai dari dijadikannya Islam sebagai agama negara oleh sultan yang pertama. Perubahan bentuk pemerintahan dari kerajaan menjadi kesultanan, ditandai dengan gelar penguasanya adalah sultan. Sebelumnya para penguasa Palembang bergelar *Ki Gede, Kemas/Ki Mas* dan *Pangeran* (Faille, 1971:24). Berikutnya adalah adanya lembaga kepenghuluhan dalam struktur kesultanan dari pusat sampai tingkat dusun, pendirian masjid yang indah, juga berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upacara keagamaan. Penguasa Palembang juga semakin leluasa mengembangkan diri, seiring dengan berakhirnya “pertuanan” terhadap Mataram<sup>1</sup>. Meskipun demikian, apakah Islam di Kesultanan Palembang sudah layak dianggap sebagai kerajaan Islam yang menjalankan agama yang dipeluknya dengan sebaik-baiknya. Inilah yang digugat oleh para saksi sejarah dan penulis kolonialis sampai abad XIX.

Di mata kaum kolonialis zaman VOC dan Hindia Belanda, yang berintaksi secara langsung maupun tidak langsung dengan penguasa atau rakyat Palembang, menyatakan bahwa ummat Islam di Kesultanan Palembang hanya kulit luar saja. Dikatakan pula bahwa umumnya penduduk Palembang tidak begitu memahami agama yang mereka anut, otomatis hanya sedikit yang mampu memahami Al Quran. Sebagian besar penduduk masih bodoh dan percaya pada takhayul. Para penguasa Palembang tidak banyak berbuat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Di sisi lain, sebagian ulama hanya mengejar ambisi dengan ilmu yang dimilikinya. Sangat sedikit dari ulama-ulama yang ada yang mengembangkan tradisi menulis. Kondisi demikian berbanding terbalik dengan orang-orang Arab yang terkenal taat dalam menjalankan agama Islam. Ketaatan itu sudah sudah ditanamkan sejak mereka masih belia (Storm, 1856: 458-459; Loman, 1884: 429; *Schetsen ...*, 1848:104-105)

Rendahnya pemahaman penduduk terhadap agama Islam, menyebabkan berkembang kepercayaan pada takhayul. Contohnya, percaya pada *Sumai*. *Sumai* adalah makhluk “jadi-jadian” yang dapat berubah wujud dari manusia menjadi harimau. Penduduk umumnya meyakini bahwa setiap harimau adalah *Sumai*. Akibatnya, tidak ada yang berani memburu dan membunuh binatang tersebut, meskipun keselamatan mereka terancam. Kondisi tersebut menyebabkan populasi hewan ini terus bertambah, sedangkan jumlah penduduk sangat sedikit<sup>2</sup>, menghuni kawasan yang sangat luas dengan hutan-hutannya. Keyakinan akan keberadaan makhluk “jadi-jadian” tersebut sangat merasuk ke dalam jiwa setiap penduduk. Dari sumber kolonial diperoleh informasi setiap hari penduduk *uluan* kehilangan anggota keluarganya karena diterkam oleh harimau. Keyakinan pada *Sumai* menyebabkan penduduk pergi meninggalkan kampungnya, yang berarti kampung-kampung akan semakin sepi dan jumlah penduduk akan semakin berkurang. Selain itu, penduduk Palembang pada waktu itu, juga masih terikat kepercayaannya kepada berbagai takhayul, azimat, dan *puyang*. *Puyang* adalah orang “pintar” yang memiliki kelebihan yang berasal dari para dewa atau leluhur. Kesaktian itu umumnya diperoleh melalui ritual “tapa” yaitu berdiam diri dalam jangka tertentu di kuburan leluhur atau tempat-tempat yang dianggap keramat. Setelah usaha dianggap berhasil (biasanya melalui mimpi), maka orang tersebut akan menyebut dirinya tuhan atau anak tuhan. Biasanya orang tersebut akan cepat mendapat pengikut (*Schetsen van...*, 1848:104-105; Storm, 1856: 458). Konsep tuhan dan anak tuhan tentunya tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang bangsa Eropa (Belanda) tentang “Trinitas” yang menulis hal tersebut. Kemungkinan yang dimaksud adalah seseorang yang memperoleh “kesaktian” setelah melalui proses *ngelmu* yaitu melakukan “tapa”. Setelah berhasil maka ia menjadi “orang pintar” yang memiliki kelebihan dari penduduk umumnya, baik berupa kemampuan mengobati orang sakit atau memiliki ilmu kebal, atau perpaduan dari keduanya. Berbagai bentuk kepercayaan di atas, tetap diterima dan diyakini oleh masyarakat, walaupun mereka menyebut dirinya beragama Islam. Contoh-contoh tersebut dipandang “aneh” oleh orang-orang Belanda.

Beberapa contoh lain dijadikan pula oleh pihak Belanda untuk menyatakan bahwa penduduk Palembang tidak fanatik dengan agamanya. Disebutkan bahwa penduduk Palembang senang memelihara anjing, berjudi dengan menyabung ayam, sebagian penduduk bahkan ada yang masih menganut kepercayaan lama (animism). Bahkan

---

<sup>1</sup> Hubungan terakhir antara Palembang dan Mataram terjadi pada tahun 1677. Pada waktu itu Palembang mengirimkan bala bantuan sebanyak sepuluh kapal ke Mataram, yang pada waktu itu tengah membasmi pemberontakan Trunojoyo (Faille, 1971:24)

<sup>2</sup> Pada tahun 1812 penduduk kota Palembang terdiri dari 20 ribu sampai 30 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 1834 sebanyak 182.364 jiwa, tahun 1835 mencapai 190.158 jiwa (*ANRI*, Bundel Palembang NO. 62.2; *Java Gouvernement Gazette*, 4 Juli 1812).

penduduk Makakau (daerah perbatasan dengan Lampung) melaksanakan solat pada hari Rabu bukan hari Jumat sesuai ketentuan Islam. Mereka juga menguburkan anggota keluarganya yang wafat menghadap ke timur, bukan ke barat sesuai ketentuan Islam. Di sini dijelaskan pula bahwa di daerah *uluan*, agama Islam tidak dijalankan seketat di ibu kota Palembang. Penduduknya lebih mengutamakan adat istiadat (Sturler, 1843: 86; Rahim, 1998: 53-54).

Contoh-contoh yang telah dipaparkan dapat diterima sebagai bukti lemahnya agama Islam dianut oleh penduduk Palembang. Meskipun demikian, perlu pula digarisbawahi pernyataan bahwa berbagai penyimpangan tersebut umumnya terjadi di daerah *uluan*, yaitu daerah yang berada jauh dari ibu kota Kesultanan. Wilayah yang sangat luas, dan sulitnya jalur komunikasi antara pusat dan daerah, serta sangat terbatasnya ulama<sup>3</sup> yang dapat membimbing aqidah penduduk (lihat catatan kaki 1 hlm 3), mengakibatkan terjadinya berbagai penyimpangan dalam menjalankan agama Islam.

Berbagai pernyataan di atas, harus diteliti dengan jeli. Apakah penjelasan tersebut mewakili seluruh penduduk Kesultanan Palembang? Wilayah Palembang sangat luas. Sampai abad XIX wilayahnya membentang dari Ampat Lawang dan Rejang di sebelah barat, Rawas di sebelah utara, Kisam dan Makakau di selatan dan pulau Bangka-Belitung di sebelah timur. Kesatuan wilayah ini sejak abad XVII dipimpin oleh Sultan Abdul Rakhman (1649—1694). Selama pemerintahannya yang berlangsung selama 45 tahun, sultan ini terkenal sebagai raja yang adil dan pandai. Dalam masa kepemimpinannya yang lama itu, sultan ini telah banyak melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan Islam sebagai agama resmi Kesultanan. Penetapan tersebut berdampak diadakannya lembaga kepenghuluan yang di tingkat pusat dipimpin oleh Penghulu Nata Agamo. Penghulu Nata Agamo membawahi *Penghulu Kecil*, Khatib Penghulu, Khatib imam dan para imam. Penghulu Nata Agamo menangani masalah warisan, perkawinan, perceraian dan peribadatan. Sebagai pemegang urusan agama untuk seluruh kerajaan, posisi ini menempatkannya sebagai pemegang keputusan terakhir dalam masalah-masalah yang menyangkut keagamaan. (Schetsen van..., 1848: 283; Masyhuri, 1983: 42-44; Peeters, 1997: 11-12; Sevenhoven, 1971: 29; Sturler, 1843:87; Veth, 1869: 651).

Keberadaan lembaga ini sangat besar pengaruhnya terhadap perikehidupan masyarakat Kesultanan Palembang pada waktu itu. Dengan demikian, jelaslah bahwa sesuai dengan bidang garapnya, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan peribadatan, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam. Begitu pula dengan perkawinan, perceraian, warisan dan lainnya. Jelaslah bahwa semua yang menyangkut hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan sesama manusia sudah diatur melalui lembaga kepenghuluan. Agar lembaga tersebut dapat berjalan efektif, maka pihak pemerintah harus melengkapi berbagai hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Otomatis peran kelompok ulama sebagai orang yang ahli agama Islam menjadi sangat penting, karena kelompok inilah yang akan “membumikan” lembaga tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai tuduhan negatif tentang kekurangan penduduk Palembang terhadap agama Islam, menjadi bias dengan fakta yang mereka paparkan dalam berbagai tulisan. Dalam laporan Sturler<sup>4</sup> (1843:78), disebutkan bahwa

---

<sup>3</sup> Tercatat beberapa nama tokoh agama Islam yang berperan dalam menyebarkan agama di *uluan* dan membina. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Syekh Mahmud Said Ratu Syekh Alam Raje Kute Talang Gumilang, dan Syekh Angkasa Ibrahim pada tahun 1311 di daerah Lematang, nantinya diikuti oleh Ratu Syekh Angkasa Ibrahim. Lebih kemudian muncul pula Malim Mukidim sebagai tokoh yang ikut mengembangkan dan membina keyakinan penduduk terhadap agama Islam. Di daerah Semendo, tokohnya adalah Ahmad Sobirin Anom Suro pada tahun 1397. Sedangkan di daerah Dempo, penyebaran Islam dipimpin oleh Syekh Jalil pada tahun 1412. Setelah pertengahan abad XV terkenal pula penguasa Dangku yaitu Muhammad Fadillah gelar Raje Sakti yang telah memeluk Islam. Di daerah lain juga terdapat tokoh-tokoh penyebar Islam yang tidak dapat diketahui kurun waktu pasti kapan mereka menyebarkan agama Islam. Akan tetapi, ketokohan mereka tidak diragukan lagi. Tingkat ketokohnya disamakan dengan wali-wali di Pulau Jawa. Di daerah Koming, tokohnya antara lain Tuan Tanjung Idrus Salam, Kemas Jambu, Syekh Habibul Hamim. Di daerah Rawas, muncul nama Bujang Jawe, Penghulu Haji Pidin, Pangeran Abuleman sebagai penyebar agama Islam. Para tokoh tersebut berasal dari berbagai daerah, antara lain Aceh, Demak, Banten, Mataram, Minang, Kalimantan. Di samping itu, pihak keraton Kesultanan Palembang juga aktif mengirimkan utusan-utusannya untuk mengislamkan dan membina keimanan penduduk *uluan* (Ali, 1984:15-18, 26-31).

<sup>4</sup> H. de Sturler adalah pejabat pada masa pemerintahan Residen Reynst, posisinya pada waktu itu adalah asisten residen. Sturler adalah orang yang ditugaskan oleh residen untuk memimpin pasukan Belanda dari ibu kota Palembang, guna menghadapi perlawanan Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom di *uluan* (Rawas, Rejang, dan Kikim) tahun 1824-1825 (ANRI, Bundel Palembang No. 46.4).

para penguasa Kesultanan Palembang umumnya adalah penganut agama Islam yang taat. Hukum Islam diterapkan secara tegas. Dengan demikian, melalui “alatnya” berupa lembaga kepenghuluan yang jangkauannya sampai ke dusun-dusun di *uluan*, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam juga diterapkan dengan seluruh kekuasaan Kesultanan Palembang. Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya disebutkan bahwa pelanggaran terhadap agama dan adat akan mendapat hukuman mulai dari denda (uang mulai dari dua ringgit hingga 400 ringgit, hewan piaraan, atau bahan makanan pokok), dikucilkan, dibuang (*kapanjing*) sampai dibunuh. Kontrol sosial masih sangat tinggi dan sanksi sosial sangat berat tidak hanya bagi pelaku, tetapi bagi keluarga bahkan seluruh warga dusunnya (Hanifah, 1984).

Fakta lain menyebutkan, bahwa pihak Belanda meyakini bahwa berbagai perlawanan dalam bentuk peperangan baik yang terjadi di ibu kota maupun di *uluan* (pedalaman). Semua itu digerakkan oleh keyakinan kuat terhadap agama Islam yang berasal dari ajaran AlQuran. Keyakinannya pada “melawan Belanda adalah jihad melawan kafir”, sejalan pula dengan keinginan untuk menyiarkan agamanya kepada orang-orang kafir. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Sturler pascapemberontakan yang dilancarkan oleh Sultan Najamuddin Prabu Anom ( Sturler, 1843:79-82). Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari bait-bait syair Perang Menteng<sup>5</sup> yang dengan jelas menyebutkan peran para ulama yang khusus digambarkan dengan nama “haji-haji”. Para haji berperang melawan Belanda dan syahid mempertahankan kedaulatan Kesultanan Palembang. Dalam peperangan yang terjadi pada Juni dan Oktober 1819, Palembang memperoleh kemenangan.

Lebih lanjut Sturler (1843: 83-87) menyatakan bahwa, sebagaimana etnis-etnis lain di Nusantara yang taat kepada keyakinan mereka, begitu pula penduduk Palembang. Mereka menjalankan ibadah shalat lima waktu, bahkan Sturler memerinci waktu shalat lima waktu umat Islam, lengkap dengan pemukulan bedug besar yang menandai waktunya shalat. Kesultanan Palembang juga terkenal memiliki masjid (masjid Agung) yang terbesar dan terindah di Hindia Belanda. Di samping itu, masih terdapat masjid-masjid dan surau-sarau yang lebih kecil bentuknya terbuat dari kayu yang dihiasi ukiran-ukiran. Sistem penanggalan yang digunakan pada waktu itu adalah penanggalan hijriyah. Anak-anak sejak usia dini sudah diajarkan doa-doa bahasa Arab, dan mengaji, anak laki-laki dikhitam pada kisaran usia 6—10 tahun, yang dikenal dengan nama *lepas malu*. Biasanya penyelenggaraannya diikuti dengan pesta. Untuk anak perempuan pada usia 10--12 tahun dilakukan tindik telinga dan pengikiran gigi. Meskipun demikian, sebagian besar tidak mengetahui maknanya. Secara umum penduduk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai ketentuan agama Islam, dan sangat memuliakan ibadah haji. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa hanya sebagian penduduk yang dapat membaca dan memahami makna yang terkandung di dalam Al Quran. Akan tetapi, semua yang digambarkan di atas, menunjukkan betapa “semarak” agama Islam dijalankan oleh penguasa dan penduduk Palembang. Para sultan berperan aktif dalam mengirim pada dai (lihat catatan kaki no.3 hlm 5) ke daerah *uluan* dalam rangka menyebarkan agama Islam dan membina para pemeluknya.

Bagaimana sesungguhnya Islam di Palembang? Perjalanan panjang dari masuk pada abad VII, berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan yang bercorak Islam membutuhkan waktu sekitar delapan abad. Sejarah Palembang pascaruntuhnya Sriwijaya senantiasa berada dalam “pertuanan”. Mulai dari Majapahit, Demak, Pajang, dan terakhir Mataram. Masa-masa pertuanan tersebut adalah masa emas perkembangan Islam di Nusantara. Kondisi tersebut berdampak negatif terhadap lambannya Palembang dalam perannya sebagai “pelaku aktif” pendukung Islamisasi untuk wilayahnya sendiri atau bahkan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Walaupun demikian, pascakemunduran Aceh, Palembang muncul sebagai pusat studi dan sastra Islam (1750-1850). Menurut Steenbrink (1984: 65-66), Palembang dan Banjarmasin menyambut peran yang sudah mulai “reda” dari Aceh selaku pendukung penyebaran dan pemantapan Islam di Nusantara.

Sebagaimana keraton-keraton Melayu pada umumnya yang senantiasa menjadi pusat studi dan sastra Islam. Hal tersebut sudah berlangsung seiring tumbuh dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Para sultan berperan aktif dalam memberi “suasana” yang kondusif demi kelangsungan hal tersebut. Kesultanan Palembang juga melakukan hal yang sama. Disebutkan bahwa sejak Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1757) telah berkembang penulisan kitab-kitab tentang agama Islam. Pada masa ini terkenal penulis yang bernama Syekh Syihabuddin bin Abdullah Muhammad, ia telah menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu pada tahun 1750 kitab *Jawharat al-Tawhid* karya Ibrahim al Laqani. Karyanya yang lain adalah kitab *Risala* dan kitab *Aqidat al Bayan*. Pada masa pemerintahan puteranya yaitu Sultan Ahmad Najamuddin I (1757-1774), muncul pula tokoh agama yang terkenal yaitu Kemas Fakhruddin. Ulama besar ini menghasilkan karya terjemahan dari kitab *Risalah fi al Tawhid* karangan Syekh Raslan al Dimasyqi, yaitu *Kitab Mukhtashar*. Kemas Fakhruddin juga melahirkan karya besar lainnya yaitu *Futuh al Sha'am*. Kitab ini adalah terjemahan dari kitab *Futuh al Sha'am* karya Waqidi. Kitab berikutnya adalah

---

<sup>5</sup> Syair Perang Menteng atau Perang Muntinghe menggambarkan peperangan yang terjadi antara Kesultanan Palembang dan Belanda pada tahun 1819. (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; ANRI, Bundel Palembang No. 67; Kielstra, 1920: 132; Kemp, 1900: 586-587; Woelders, 1975: 194-196).

terjemahan dari kitab *Tuhfat al Zaman fi Zharf ahl al Yaman* karya Ibn Shaddad dan kitab *Khawash al Quran al Azhim*. Tradisi ini berlanjut pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin (1774-1804). Sesuai dengan tradisi yang turun temurun dan suasana keilmuan yang sudah dikenalnya sejak kecil, maka pada masa pemerintahannya muncul ulama yang sangat terkenal. Kehebatannya tidak hanya dikenal di Palembang dan Nusantara bahkan di Timur Tengah. Ulama tersebut adalah Abd Shamad Al Palimbani (1737-1839)<sup>6</sup> (Abdullah,2012: 23,65; Rahim, 1998: 92-97).

Selain itu masih ada tokoh-tokoh lain, yaitu Muhammad Muhyiddin bin Syekh Syihabuddin. Karyanya adalah *Hikayat Karamat Shaikh Muhammad Samman dengan Iktisar*. Kemas Muhammad bin Ahmad dengan karya *Nafahat al Rahman fi Munaqib Ustazina al-Azham al Samman* dan *Bahr al-Aja'ib*. Muhammad Makruf bin Abdallah Khatib Palembang, dengan karya *Tariqah yang dibangsakan kepada Qadiriyah dan Naqsabandiyah*. Buku-buku tersebut umumnya membahas tentang ilmu tauhid, ilmu kalam, tasawuf, tarekat, dan al-Quran. Kitab-kitab lainnya adalah membahas tentang sejarah dan sastra. Yang membicarakan tentang sejarah antara lain *Cerita Negeri Palembang*, *Carita daripada Aturan Raja-Raja di Dalam Negeri Palembang* dan *Hikayat Mahmud Badaruddin* karya Pangeran Tumenggung Karta Menggala. Kitab *Silsilah Raja-Raja di dalam Negeri Palembang*. Buku-buku yang membahas tentang sastra, antara lain *Syair Raja Mambang Jawhari*, *Syair Kembang Air Mawar* dan *Syair Patut Delapan* karya Pangeran Panembahan Bupati. *Hikayat Andaken Panurat* karya Ahmad bin Abdullah (Rahim, 1998:93-95). Di samping itu masih terdapat karya-karya lain yang belum terlacak karena berbagai kendala, baik masa kesultanan maupun sesudahnya. Karya-karya tersebut sebagian masih dimiliki oleh orang-perorang di kota Palembang.

Sultan Mahmud Badaruddin II adalah salah satu sultan yang menghasilkan karya sastra, karya-karyanya adalah *Syair Nuri*, *Pantun*, dan *Sinyor Kosta*. Sultan ini juga memiliki perputakaan yang lengkap. Pacapembuangan ke Ternate, pihak Belanda pada waktu itu (Komisaris Sevenhoven) memerintahkan untuk mengirimkan buku-buku milik sultan sekitar 45 naskah (65 manuskrip di perpustakaan Universitas Leiden Belanda) yang berhasil ditemukan di keraton Palembang. Bahkan disebutkan pula bahwa sejak penyerangan Inggris terhadap Palembang pada tahun 1812, telah terjadi perampasan terhadap hasil karya para filsuf Palembang oleh Inggris dan dibawa ke Negara mereka (ANRI, Bundel Palembang No. 1.8; Ikram, 2004: 51; Farida, 2012: 273; Yusuf, tanpa tahun: 223-231).

Dari berbagai bukti di atas, jelaslah bahwa para sultan Palembang memberikan perhatian yang besar terhadap agama<sup>7</sup>. Akan tetapi, bukti tersebut juga menunjukkan bahwa pengembangan ilmu agama Islam dan sastra hanya terjadi di keraton. Kelompok ilmuan menjadi golongan elite yang hanya berkutat di dalam keraton. Hal tersebut menyebabkan agama Islam tidak mengakar pada penduduk khususnya yang ada di *uluan*. Berbeda yang terjadi di Pulau Jawa, agama Islam menyebar dan mengakar melalui pondok-pondok pesantren yang menyebar sampai ke pelosok-pelosok (Steebrink, 1984: 186). Demikian, berbagai pandangan dalam menganalisis masalah pengembangan agama Islam di Kesultanan Palembang. Terdapat beberapa data yang kontrakdiktif, namun, apabila ditelaah lebih lanjut maka akan tampak benang merah yang menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam mewujudkan agama Islam antara kelompok keraton dan penduduk Palembang khususnya yang ada di *uluan*. Keraton yang menjadi pusat ilmu agama Islam dan sastra, cenderung kiprahnya hanya untuk kalangan tertentu saja, sedangkan penduduk tersebar di wilayah yang sangat luas sehingga sulit dijangkau dari pusat kekuasaan. Pada dai yang dikirim oleh sultan untuk menyebarkan dan membina keislaman penduduk sangat terbatas. Pihak keraton dan lembaga kepenghuluan tidak mengembangkan Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai mana yang berkembang di Pulau Jawa. Pemeluk Islam seolah berjalan “sendiri” di tengah kemajumekan penduduk yang masih terikat pada nilai-nilai lama.

---

<sup>6</sup> Karya pertamanya *Tuhfat al-Ragibin* (1188/1774), ditulisnya atas permintaan Sultan Palembang pada waktu itu yaitu Sultan Ahmad Najamuddin I. Di mukaddimah karyanya tersebut ia menuliskan “...menuntut daripada aku seorang laki-laki yang tiada boleh akan daku menyalahi dia daripada setengah orang yang lebih besar pada masa ini...” (Abdullah,2012: 49). Walaupun demikian, karya tersebut dimanfaatkan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin. Karya yang lain adalah *Zuhrat al Murid fi Bayan Kalimat al-Tawhid*, *Hikayat al-Salikin fi Suluk Maslak al-Muttaqin*, *Sair al-Salikin ila Tbadat Rabb al-Alamin*, *Nashihat al-Muslimin wa Tazkirat al Mu'minin fi fada'il al-Jihad fi Sabil Allah wa Karamat al-Mujahidin fi Sabil Allah*, *Al-Urwat al-Wasqa wa-Silsilat Uli al-ittiqa dan Kitab Ratib Abd Shamad al-Palimbani* (Rahim, 1998:94).

<sup>7</sup> Buktinya sebagian kitab yang ditulis oleh pengarang Palembang, dinisbahkan mereka kepada Sultan Mahmud Badaruddin II, Sultan Ahmad Najamuddin I, Sultan Muhammad Bahauddin, Pangeran Jayakrama dan Pangeran Arya Muhammad Zainuddin (Rahim,1998: 96).

## PENUTUP

Membicarakan Islam pada era kesultanan, sumber terbanyak yang dapat digunakan adalah sumber kolonial khususnya Belanda. Dengan demikian, tidak dapat dihindari adanya bias pandangan. *Pertama*, kehadiran mereka datang ke wilayah ini dengan maksud mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui monopoli perdagangan, bahkan melancarkan peperangan demi menguasai wilayah yang sangat kaya akan hasil alam dan tambang ini. Akibatnya, sudut pandang yang digunakan adalah semata-mata demi kepentingan tersebut. *Kedua*, sebagai bangsa asing yang datang ke daerah ini dengan latar belakang agama dan budaya berbeda. Otomatis “kacamata” yang mereka gunakan untuk mengukur tingkat kesalehan penduduk Palembang, menggunakan agama dan budaya mereka. Jelas, hasilnya akan sangat bertolak belakang. *Ketiga*, beberapa sumber yang digunakan rujukan dalam tulisan ini ditulis oleh tokoh Belanda (Komisaris Sevenhoven) yang menulis berdasarkan pandangan sekilas tentang kehidupan masyarakat dan kalangan atas yang pada waktu itu berada pada posisi kalah setelah peperangan panjang kurun waktu 1819 dan 1821. Kehidupan ekonomi yang sulit dan kehilangan tempat bergantung (sejak Sultan Mahmud Badaruddin II dibuang ke Ternate, maka Kesultanan Palembang dikendalikan oleh Belanda dan Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom hanya sebagai lambang). Berbagai kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kehidupan keagamaan mereka.

Pandangan miring atas kehidupan keagamaan di *uluan*, tidak dapat dipungkiri. Sebagian penduduk hanya menganut Islam secara lahirnya saja. Hal ini tidak dapat dilepas dari terbatasnya pada ulama yang berperan aktif di sana, sesuai dengan penggambaran para penulis Belanda. Meskipun demikian, berdasarkan uraian sebelumnya tampak bahwa pada abad XIV telah berperan aktif para ulama dalam menyebarkan dan membina agama Islam berdasarkan sumber lokal yang terdapat di *gelumpai-gelumpai* dan sumber-sumber lainnya. Di ibu kota Palembang abad XVIII dan XIX juga marak pengkajian dan pengembangan agama Islam yang disponsori oleh pihak keraton, sehingga Palembang menjadi kesultanan yang diperhitungkan dalam perannya terhadap pengembangan agama Islam di Nusantara.

## DAFTAR PUSTAKA

ANRI, *Nota rapporten betreffende Palembang over 1811 tot 1821*, Bundel Palembang No. 5.1

ANRI, *Verhaal van de politieke en militaire gebeurtenissen te Palembang gedurende*

*1811, 1821 en eiland Banka door A. Meis, kapitein der arteleerie, 1840*, Bundel Palembang No. 67.

ANRI, *Jaarlijksch Verslag van de Residentie Palembang over 1834 en 1835*, Bundel Palembang No. 62.2

Stibbe, D.G., *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, eerste deel*, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932.

Veth, P.J., *Aardrijkskundig Woordenboek van Nederlandsch Indie*, Amsterdam, P.N. van Kampen, 1869.

*Java Gouvernement Gazette*, Sabtu, 4 Juli 1812

Abdullah, Taufik., *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Abdullah, Mal an, *Jejak Sejarah Abdus-Samad Al -Palimbani*, Palembang: Syariah IAIN Raden Fatah Press, 2012

Faille, P. Roo de la, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, Jakarta: Bhratara, 1971.

Farida, *Perebutan Kekuasaan di Kesultanan Palembang (1804—1825)*, Depok: Disertasi yang belum diterbitkan, 2012.

Hanifah, Abu, *Undang-undang Simbur Cahaya*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994

Ikram, Achadiati. *Sejarah Palembang dan Sastranya*, dalam *Jati Diri yang terlupakan : Naskah-Naskah Palembang*, Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara, 2004.

Masyhuri, *Perdagangan Lada dan Perubahan Sosial Ekonomi di Palembang 1790-1825*, Thesis yang belum diterbitkan, Fakultas Pascasarjana Bid.Studi Sejarah Universitas Indoensia, 1983.

Peeters, Jeroen, *Kaum Tuo-Kaum Mudo, Perubahan Religijs di Palembang 1821-1942*, Jakarta, Seri INIS XXXI, 1997.

- Rahim, Rusli, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: Logos, 1991.
- Steebrink, Karel A., *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sevenhoven, J.L. van, *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*, (Terjemahan *Beschrijving van de Hoofdplaats van Palembang*), Jakarta: Bhrata, 1971.
- Ta Sen, Tan, *Cheng Ho Penyebar Islam dari China ke Nusantara*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010
- Woelders, M.O., *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*, Leiden: VKI Publ. No.72, 1975.
- Kemp, P.H. van der, *Palembang en Banka in 1816 – 1820*, Bijdrage van Koloniaal Instituut, Jilid LI, 1900.
- Kielstra, E.B., *De Ondergang Van Het Palembangse Rijk*, de Gids, 1892.
- Loman, J.C.C., *Een Kijkje in de Palembangse Bovenlanden*, De Gids, III, 1884
- Schetsen van Palembang*, Tijdschrift voor Neerlandsch Indie, Jilid III, dan VIII, 1848
- Storm, van s'Gravesande, F.J.B., *De Stad Palembang*, TBG, Jilid V, 1856.
- Sturler, W.L., *Proeve eener Beschrijving van Het Gebiet Palembang, Zuid-Oostelijk Gedeelte Sumatra*, Groningen: J. Oormens, 1843
- ANRI, Bundel Palembang No.46.4.
- ANRI, *Register van Besluiten Januari – Juni 1822*, No.1-54. Bundel Palembang No. 1.8.